



UNIVERSITAS TADULAKO/ TADULAKO UNIVERSITY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS/ FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
JURUSAN AKUNTANSI/ ACCOUNTING DEPARTMENT
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI/STUDY PROGRAM OF BACHELOR DEGREE

**Kode
Dokumen**

AK1013

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Akuntansi Sektor Publik		C31232013	AkuntansiSektor Publik	T=2	P=1	3 (Tiga)	23/06/2025
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
		Tim Konsentrasi ASP		Prof. Dr. Ridwan, S.E., M.Si., Ak., C.A		Dr. Ni Made Suwitri Parwati, S.E., M.Si, Ak.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL2	CPL2. Lulusan Mampu menjalankan peran akuntan dan fungsi akuntansi secara profesional dan beretika.					
	CPL3	CPL3. Lulusan Mampu menguasai teori, konsep dan prinsip ekonomi, bisnis dan akuntansi					
	CPL7	CPL7.Lulusan Mampu menganalisis data dan informasi secara terstruktur, serta mengkomunikasikannya secara lisan dan tulisan.					
	CPL8	CPL8. Lulusan Mampu menganalisis laporan keuangan dan non keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.					
	CPL10	CPL10.Lulusan Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keuangan organisasi dan penerapan akuntansi berbasis tata kelola yang baik, Manajemen Risiko dan aspek keberlanjutan (pencirian).					
	CPL ⇒ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	PLO2						
	PLO3	C2. Mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar dan karakteristik organisasi sektor publik secara komprehensif.					
	PLO7	C3. Mahasiswa mampu menerapkan IPSAS (International Public Sectorrrs Accounting Standasrds) secara komprehensif.					
	PLO8	P2 Mahasiswa mampu membuat penyusunan laporan keuangan organisasi sektor publik secara akurat.					
	PLO10						
	CPMK ⇒ Sub-CPMK						
	CP.C2	1. Memahami Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik					
	CP.C2	2. Mampu Menyusun Perencanaan dan Penganggaran					
	CP.C2	3. Mampu Memahami Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik					
	CP.C2	4. Mampu Memahami Akuntansi Untuk Entitas Partai Politik					
	CP.P3	5. Mampu Memahami Akuntansi Untuk Entitas Non Goverment (LSM)W					
	CP.A5	6. Mampu Memahami Akuntansi Untuk Yayasan					

	CP.P3 CP.A5 CP.C2	7. Mampu memahami Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah 8. Mampu memahami Akuntansi Untuk Entitas Institusi Pendidikan Badan Layanan Umum 9. Mampu Memahami Audit Sektor Publik						
	Korelasi antara CP dan asesmen							
	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Metode Pembelajaran	BENTUK ASESMEN			Bobot penilaian (%)
					FORMATIF	SUMATIF		
						PjBL	Studi Kasus	lainnya
	CPL2	C2.C2. C2.C2. CP.P3. CP.A5. CP.P3. CP.A5. CP.C2	Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3	Tertulis, dan Lisan	Quiz			Keaktifan Kelas
								15%
CPL3	C2.C2. C2.C2. CP.P3. CP.A5. CP.P3. CP.A5. CP.C2	Sub-CPMK4 Sub-CPMK5	CoL, dan PjBL		Project			15%
CPL4	C2.C2. C2.C2. CP.P3. CP.A5. CP.P3. CP.A5. CP.C2	Sub-CPMK6 Sub-CPMK7	SDL, dan CbL SDL, dan CtL			Latihan Soal/Pemba hasan Kasus		20%
CPL7	C2.C2. C2.C2. CP.P3. CP.A5. CP.P3. CP.A5. CP.C2	Sub-CPMK8	SDL, dan CbL SDL, dan CtL			Tugas individu		15%
CPL8	C2.C2. C2.C2.	Sub-CPMK9	SDL, dan CbL SDL, dan CtL			Tugas individu		10%

		CP.P3. CP.A5. CP.P3. CP.A5. CP.C2							
	CPL10	C2.C2. C2.C2. CP.P3. CP.A5. CP.P3. CP.A5. CP.C2	Sub-CPMK9	SDL, dan CbL SDL, dan CtL				Ujian Tertulis	25%
									100%
Deskripsi Singkat MK	Dapat memahami, menjelaskan dan menganalisis Akuntansi Sektor Publik (ASP) di Indonesia yang mencakup, karakteristik dan ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik, dan akuntansi pada entitas nirlaba non pemerintah. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk ceramah teori dan penugasan dengan model pembelajaran yang variatif seperti <i>small group discussion</i> , <i>discovery learning</i> , <i>contextual learning</i> dan <i>problem based learning</i> serta didukung dengan praktek yang akan diberikan diluar pembelajaran.								
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik 2. Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik 3. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik) 4-5. Akuntansi Untuk Entitas Partai Politik 6-7. Akuntansi Untuk Entitas Non Government (LSM) MATERI 1-7 UJIAN TENGAH SEMESTER 9-10. Akuntansi Untuk Yayasan 11-12. Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah 13-14. Akuntansi Untuk Entitas Institusi Pendidikan Badan Layanan Umum (BLU) 15. Audit Sektor Publik MATERI 9-15 UJIAN AKHIR SEMESTER								
Pustaka	Utama:								
	Halim, Abdul & Kusufi Muhammad Syam (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta. (HAK)								
	Pendukung:								
	1. Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta. (MR). 2. Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). <i>Public Sector Accounting. Sixth Edition</i> . Pearson Education. England. (JP) 3. Kuntadi, Cris. (2015). Si Kencur. Elex Media Komputindo. Jakarta (KC) 4. IFAC & CIPFA. (2014). <i>International Framework: Good Governance in The Public Sector Accounting</i> . ISBN 978-1-60815-181-3. (IFAC-GG) 5. IPSASB. (2020). <i>Handbook Of International Public Sector Accounting Standards Pronouncements 2020 Edition Volume I-III</i> . ISBN 978-1-60815-451-7. English. (IPSASB) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP71)								

	7. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK): 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (ISAK35). 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo..UU Nomor 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015. 13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004. 14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011. 19. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jo. UU Nomor 16 Tahun 2017 22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016, Jo. UU Nomor 6 Tahun 2020. 23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastruktur 27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. 28. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 29. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. 31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Jo. PP Nomor 1 Tahun 2018. 32. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dosen Pengampu	
Mata kuliah syarat	Pengantar Akuntansi 2

Pekan Ke-	CPL CPMK Sub-CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran (BP), Metode Pembelajaran (MP),		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Formatif	Sumatif	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. Mengetahui Proses	Teknik Penilaian:	Indikator	1.Pemaparan singkat,		1. Kontrak	Partisip

Pekan Ke-	CPL CPMK Sub-CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran (BP), Metode Pembelajaran (MP),		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Formatif	Sumatif	Luring (offline)	Daring (online)		
	pembelajaran terkait Metode Perkuliahan, Materi Bahasan, dan Prasyarat Mata Kuliah. 2. Mampu Memahami Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik	● Quiz di LMS (mis MCQ) ● Tanya jawab langsung dalam kelas ● Quiz interaktif (misalnya Slido, Mentimeter, Kahoot, dll)	Penilaian: Kemampuan Mahasiswa Menjelaskan Kerangka Konseptual ASP Teknik Penilaian: Kuantitatif/ Kualitatif Kriteria Penilaian:	diskusi tentang materi 2. Mempelajari bahan yang tersedia		perkuliahan, RPS & gambaran umum mata kuliah. 2. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik 3. Regulasi yang terkait dengan penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia.	asasi (4%)
2	Mampu Menyusun Perencanaan dan Penganggaran	Teknik Penilaian: ● Quiz di LMS (mis MCQ) ● Tanya jawab langsung dalam kelas ● Quiz interaktif (misalnya Slido, Mentimeter, Kahoot, dll)	Indikator Penilaian: Kemampuan Mahasiswa Menyusun Perencanaan dan Penganggaran Teknik Penilaian: Kuantitatif/ Kualitatif Kriteria Penilaian:	1. Presentasi mahasiswa dalam kelas, Pemaparan singkat, diskusi tentang materi 2. Mendiskusikan kasus 3. Mempelajari bahan yang tersedia		Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik	Partisipasi (3%), Tugas (2%)
3	Mampu Memahami Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik	Teknik Penilaian: ● Quiz di LMS (mis MCQ)	Indikator Penilaian: Kemampuan Mahasiswa Menjelaskan SPM	1. Presentasi mahasiswa dalam kelas, Pemaparan singkat, diskusi		1. Sistem Pengendalian Manajemen	Partisipasi (5%)

Pekan Ke-	CPL CPMK Sub-CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran (BP), Metode Pembelajaran (MP),		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Formatif	Sumatif	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
		● Tanya jawab langsung dalam kelas ● Quiz interaktif (misalnya Slido, Mentimeter, Kahoot, dll)	Sektor Publik Teknik Penilaian: Kuantitatif/ Kualitatif Kriteria Penilaian:	tentang materi 2. Mendiskusikan kasus 3. Mempelajari bahan yang tersedia		Sektor Publik	
4-5	Mampu Memahami Akuntansi Untuk Entitas Partai Politik	Teknik Penilaian: ● Quiz di LMS (mis MCQ) ● Tanya jawab langsung dalam kelas ● Quiz interaktif (misalnya Slido, Mentimeter, Kahoot, dll)	Indikator Penilaian: Kemampuan Mahasiswa Menjelaskan Akuntansi untuk Entitas Partai Politik Teknik Penilaian: Kuantitatif/ Kualitatif Kriteria Penilaian:	1. Presentasi mahasiswa dalam kelas, Pemaparan singkat, diskusi tentang materi 2. Mendiskusikan kasus 3. Mempelajari bahan yang tersedia		Akuntansi Untuk Entitas Partai Politik	Partisipasi (6%) Tugas (2%)
6-7	Mampu Memahami Akuntansi Untuk Entitas Non Government (LSM)	Teknik Penilaian: ● Quiz di LMS (mis MCQ) ● Tanya jawab langsung dalam kelas	Indikator Penilaian: Kemampuan Mahasiswa Menjelaskan Akuntansi Untuk LSM	1. Presentasi mahasiswa dalam kelas, Pemaparan singkat, diskusi tentang materi 2. Mendiskusikan		Akuntansi Untuk Entitas Non Government (LSM)	Partisipasi (10%) Kuis (2%)

Pekan Ke-	CPL CPMK Sub-CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran (BP), Metode Pembelajaran (MP),		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Formatif	Sumatif	Luring (offline)	Daring (online)		
		● Quiz interaktif (misalnya Slido, Mentimeter, Kahoot, dll)	Teknik Penilaian: Kuantitatif/ Kualitatif Kriteria Penilaian:	kasus 3. Mempelajari bahan yang tersedia			
8	Ujian Tengah Semester (UTS)			Mengikuti UTS sesuai dengan jadwal yang ditentukan		Materi 1-7	15%
9-10	Mampu Memahami Akuntansi Untuk Yayasan	Teknik Penilaian: ● Quiz di LMS (mis MCQ) ● Tanya jawab langsung dalam kelas ● Quiz interaktif (misalnya Slido, Mentimeter, Kahoot, dll)	Indikator Penilaian: Kemampuan Mahasiswa Menjelaskan Akuntansi Untuk Yayasan Teknik Penilaian: Kuantitatif/ Kualitatif Kriteria Penilaian:	1. Presentasi mahasiswa dalam kelas, Pemaparan singkat, diskusi tentang materi 2. Mendiskusikan kasus 3. Mempelajari bahan yang tersedia		Akuntansi Untuk Yayasan	Partisipasi (6%) Tugas (2%)
11-12	Mampu memahami Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah	Teknik Penilaian: ● Quiz di LMS (mis MCQ) ● Tanya jawab langsung	Indikator Penilaian: Kemampuan Mahasiswa Menjelaskan Akuntansi Untuk Entitas Tempat	1. Presentasi mahasiswa dalam kelas, Pemaparan singkat, diskusi tentang materi 2. Mendiskusikan		Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah	Partisipasi (8%) Tugas (2%)

Pekan Ke-	CPL CPMK Sub-CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran (BP), Metode Pembelajaran (MP),		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Formatif	Sumatif	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
		dalam kelas ● Quiz interaktif (misalnya Slido, Mentimeter, Kahoot, dll)	Ibadah Teknik Penilaian: Kuantitatif/ Kualitatif Kriteria Penilaian:	kasus 3. Mempelajari bahan yang tersedia			
13-14	Mampu memahami Akuntansi Untuk Entitas Institusi Pendidikan Badan Layanan Umum	Teknik Penilaian: ● Quiz di LMS (mis MCQ) ● Tanya jawab langsung dalam kelas ● Quiz interaktif (misalnya Slido, Mentimeter, Kahoot, dll)	Indikator Penilaian: Kemampuan Mahasiswa Menjelaskan Akuntansi untuk Entitas Institusi Pendidikan BLU Teknik Penilaian: Kuantitatif/ Kualitatif Kriteria Penilaian:	1. Presentasi mahasiswa dalam kelas, Pemaparan singkat, diskusi tentang materi 2. Mendiskusikan kasus 3. Mempelajari bahan yang tersedia		Akuntansi Untuk Entitas Institusi Pendidikan Badan Layanan Umum	Partisipasi (8%) Tugas (2%)
15	Mampu Memahami Audit Sektor Publik	Teknik Penilaian: ● Quiz di LMS (mis MCQ) ● Tanya jawab langsung dalam kelas	Indikator Penilaian: Kemampuan Mahasiswa Menjelaskan Audit Sektor Publik Teknik Penilaian:	1. Presentasi mahasiswa dalam kelas, Pemaparan singkat, diskusi tentang materi 2. Mendiskusikan kasus		Audit Sektor Publik	Partisipasi (5%) Kuis (3%)

Pekan Ke-	CPL CPMK Sub-CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran (BP), Metode Pembelajaran (MP),		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Formatif	Sumatif	Luring (offline)	Daring (online)		
		● Quiz interaktif (misalnya Slido, Mentimeter, Kahoot, dll)	Kuantitatif/ Kualitatif Kriteria Penilaian:	3. Mempelajari bahan yang tersedia			
16	Ujian Akhir Semester (UAS)			Mengikuti UAS sesuai dengan jadwal yang ditentukan.		Materi 9-15	15%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. **CPMK** diturunkan dari **CPL**.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. **subCPMK** diturunkan dari **CPMK**.
5. **Penilaian Formatif:** bertujuan memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya, dan memperbaiki proses pembelajaran.
6. **Penilaian Sumatif:** bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (untuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis)
7. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
8. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah; Responsi dan Tutorial; Seminar; Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan; Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan; Pelatihan Militer; Pertukaran Pelajar; Magang; Wirasusaha; dan/atau bentuk lain Pengabdian Kepada Masyarakat.

10. **Metode Pembelajaran:** Diskusi kelompok (*Small Group Discussion*), Simulasi (*Role-Play & Simulation*), Studi Kasus (*Case Study*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative learning*), Pembelajaran kolaboratif (*Collaborative Learning*), Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-based Learning*), Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-based Learning*) atau metode pembelajaran lainnya yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
11. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
12. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
13. **PB**=Proses Belajar, **PT**=Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri.

	UNIVERSITAS TADULAKO Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen/Program Studi S1 Akuntansi	
SILABUS SINGKAT		
MATA KULIAH	Nama	Akuntansi Sektor Publik
	Kode	C32232013
	Kredit	3 SKS
	Semester	3 (Tiga)
DESKRIPSI MATA KULIAH		
Dapat memahami, menjelaskan dan menganalisis Akuntansi Sektor Publik (ASP) di Indonesia yang mencakup, karakteristik dan ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik, dan akuntansi pada entitas nirlaba non pemerintah. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk ceramah teori dan penugasan dengan model pembelajaran yang variatif seperti <i>small group discussion</i> , <i>discovery learning</i> , <i>contextual learning</i> dan <i>problem based learning</i> serta didukung dengan praktek yang akan diberikan diluar pembelajaran.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)		
1	C2. Mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar dan karakteristik organisasi sektor publik secara komprehensif	
2	C3. Mahasiswa mampu menerapkan IPSAS (International Public Sectors Accounting Standard secara sistematis	
3	P2. Mahasiswa mampu membuat Laporan Keuangan Organisasi sektor publik secara akurat	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK)		
1	Memahami Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik	
2	Mampu Menyusun Perencanaan dan Penganggaran	
3	Mampu Memahami Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik	
4	Mampu Memahami Akuntansi Untuk Entitas Partai Politik	
5	Mampu Memahami Akuntansi Untuk Entitas Non Government (LSM)	
6	Mampu Memahami Akuntansi Untuk Yayasan	
7	Mampu memahami Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah	
8	Mampu memahami Akuntansi Untuk Entitas Institusi Pendidikan Badan Layanan Umum	

9	Mampu Memahami Audit Sektor Publik
MATERI PEMBELAJARAN	
1	Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
2	2. Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik
3	3. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik)
4	4-5. Akuntansi Untuk Entitas Partai Politik
5	6-7. Akuntansi Untuk Entitas Non Government (LSM)
6	MATERI 1-7 UJIAN TENGAH SEMESTER
7	9-10. Akuntansi Untuk Yayasan
8	11-12. Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah
9	13-14. Akuntansi Untuk Entitas Institusi Pendidikan Badan Layanan Umum (BLU)
10	15. Audit Sektor Publik
11	MATERI 9-15 UJIAN AKHIR SEMESTER
PUSTAKA	
PUSTAKA UTAMA	
	Halim, Abdul & Kusufi Muhammad Syam (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta. (HAK)
PUSTAKA PENDUKUNG	
	1. Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta. (MR). 2. Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). <i>Public Sector Accounting. Sixth Edition</i>. Pearson Education. England. (JP) 3. Kuntadi, Cris. (2015). Si Kencur. Elex Media Komputindo. Jakarta (KC) 4. IFAC & CIPFA. (2014). <i>International Framework: Good Governance in The Public Sector Accounting</i>. ISBN 978-1-60815-181-3. (IFAC-GG) 5. IPSASB. (2020). <i>Handbook Of International Public Sector Accounting Standards Pronouncements 2020 Edition Volume I-III</i>. ISBN 978-1-60815-451-7. English. (IPSASB) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP71) 7. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK): 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (ISAK35). 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo..UU Nomor 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015. 13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004. 14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

	16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011. 19. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jo. UU Nomor 16 Tahun 2017 22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016, Jo. UU Nomor 6 Tahun 2020. 23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. 28. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 29. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. 31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Jo. PP Nomor 1 Tahun 2018. 32. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
PRASYARAT (Jika ada)	
Pengantar Akuntansi 2	

	UNIVERSITAS TADULAKO Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen/Program Studi S1 Akuntansi				
RENCANA PENUGASAN TERSTRUKTUR					
MATA KULIAH	Akuntansi Sektor Publik				
KODE	C32232013	sks	3	SEMESTER	3 (Tiga)
DOSEN PENGAMPU					
BENTUK TUGAS				WAKTU Pengerjaan Tugas	
Quiz				10 Menit	
JUDUL TUGAS					
Konsep dasar dan karakteristik organisasi sektor publik					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK1 dan Sub-CPMK3					
DESKRIPSI TUGAS					
1. Mampu Menjelaskan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik 2. Mampu Menjelaskan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik					
METODE Pengerjaan Tugas					
Tertulis					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Soal					
b. Bentuk Luaran: Kemampuan Menjawab Soal					
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
Kemampuan untuk menjelaskan kerangka konseptual Akuntansi Sektor Publik, 5%					
JADWAL PELAKSANAAN					
PB	Proses Belajar				
LAIN-LAIN					
DAFTAR RUJUKAN					
Halim, Abdul & Kusufi Muhammad Syam (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta. (HAK) Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta. (MR). Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). <i>Public Sector Accounting. Sixth Edition</i> . Pearson Education. England. (JP) Kuntadi, Cris. (2015). Si Kencur. Elex Media Komputindo. Jakarta (KC)					

IFAC & CIPFA. (2014). *International Framework: Good Governance in The Public Sector Accounting*. ISBN 978-1-60815-181-3. (IFAC-GG)

IPSASB. (2020). *Handbook Of International Public Sector Accounting Standards Pronouncements 2020 Edition Volume I-III*. ISBN 978-1-60815-451-7. English. (IPSASB)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP71)

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK): 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (ISAK35).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jo. UU Nomor 16 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. [UU Nomor 10 Tahun 2016](#), Jo. UU Nomor 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

[Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah](#)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Jo. PP Nomor 1 Tahun 2018.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

	UNIVERSITAS TADULAKO Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen/Program Studi S1 Akuntansi				
RENCANA PENUGASAN TERSTRUKTUR					
MATA KULIAH	Akuntansi Sektor Publik				
KODE	C32232013	sks	3	SEMESTER	3 (Tiga)
DOSEN PENGAMPU					
BENTUK TUGAS				WAKTU Pengerjaan Tugas	
Keaktifan Kelas				Dalam Proses Perkuliahan	
JUDUL TUGAS					
Tanya – Jawab Kerangka Konseptual dan Akuntansi untuk Entitas Sektor Publik					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK4 – Sub-CPMK8					
DISKRIPSI TUGAS					
Mampu Menjelaskan Akuntansi untuk Entitas Partai Politik, Entitas Non Government, Yayasan, Tempat Ibadah, dan Entitas Institusi Pendidikan BLU					
METODE Pengerjaan Tugas					
Lisan					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Pertanyaan Lisan					
b. Bentuk Luaran: Kemampuan menjawab secara Lisan					
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
Kemampuan menjelaskan akuntansi pada berbagai entitas, 10%					
JADWAL PELAKSANAAN					
PB	Proses Belajar				
LAIN-LAIN					
DAFTAR RUJUKAN					
Halim, Abdul & Kusufi Muhammad Syam (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta. (HAK)					
Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta. (MR).					
Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). <i>Public Sector Accounting. Sixth Edition</i> . Pearson Education. England. (JP)					
Kuntadi, Cris. (2015). Si Kencur. Elex Media Komputindo. Jakarta (KC)					

IFAC & CIPFA. (2014). *International Framework: Good Governance in The Public Sector Accounting*. ISBN 978-1-60815-181-3. (IFAC-GG)

IPSASB. (2020). *Handbook Of International Public Sector Accounting Standards Pronouncements 2020 Edition Volume I-III*. ISBN 978-1-60815-451-7. English. (IPSASB)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP71)

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK): 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (ISAK35).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jo. UU Nomor 16 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. [UU Nomor 10 Tahun 2016](#), Jo. UU Nomor 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

[Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah](#)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Jo. PP Nomor 1 Tahun 2018.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

	UNIVERSITAS TADULAKO Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen/Program Studi S1 Akuntansi				
RENCANA PENUGASAN TERSTRUKTUR					
MATA KULIAH	Akuntansi Sektor Publik				
KODE	C32231014	sks	3	SEMESTER	3 (Tiga)
DOSEN PENGAMPU					
BENTUK TUGAS		WAKTU Pengerjaan Tugas			
Latihan Soal/Pemecahan Kasus		Belajar Mandiri			
JUDUL TUGAS					
Mengerjakan Soal dan Kasus					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK9					
DISKRIPSI TUGAS					
Mampu memahami prosedur audit sektor publik					
METODE Pengerjaan Tugas					
SDL, dan CbL					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Soal dan Kasus					
b. Bentuk Luaran: Tertulis					
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
Mampu menjelaskan prosedur audit dalam sektor publik, 30%%					
JADWAL PELAKSANAAN					
PT	Pelaksana Terstruktur				
LAIN-LAIN					
DAFTAR RUJUKAN					
Halim, Abdul & Kusufi Muhammad Syam (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta. (HAK)					
Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta. (MR).					
Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). <i>Public Sector Accounting. Sixth Edition</i> . Pearson Education. England. (JP)					
Kuntadi, Cris. (2015). Si Kencur. Elex Media Komputindo. Jakarta (KC)					
IFAC & CIPFA. (2014). <i>International Framework: Good Governance in The Public Sector Accounting</i> . ISBN 978-1-60815-181-3.					

(IFAC-GG)

IPSASB. (2020). *Handbook Of International Public Sector Accounting Standards Pronouncements 2020 Edition Volume I-III*. ISBN 978-1-60815-451-7. English. (IPSASB)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP71)

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK): 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (ISAK35).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jo. UU Nomor 16 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. [UU Nomor 10 Tahun 2016](#), Jo. UU Nomor 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

[Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah](#)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Jo. PP Nomor 1 Tahun 2018.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

	UNIVERSITAS TADULAKO Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen/Program Studi S1 Akuntansi				
RENCANA PENUGASAN TERSTRUKTUR					
MATA KULIAH	Akuntansi Sektor Publik				
KODE	C32231014	sks	3	SEMESTER	3 (Tiga)
DOSEN PENGAMPU					
BENTUK TUGAS				WAKTU Pengerjaan Tugas	
Project				Di Luar Jadwal Perkuliahan (Mandiri)	
JUDUL TUGAS					
Membuat Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK2					
DISKRIPSI TUGAS					
Mampu Menyusun Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik					
METODE Pengerjaan Tugas					
CoL, dan PjBL					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Project					
b. Bentuk Luaran: Laporan Project : Perencanaan dan Penganggaran Entitas Sektor Publik					
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
Kemampuan merencanakan dan menyusun anggaran untuk entitas sektor publik, 25%					
JADWAL PELAKSANAAN					
KM	Kegiatan Mandiri				
LAIN-LAIN					
DAFTAR RUJUKAN					
Halim, Abdul & Kusufi Muhammad Syam (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta. (HAK)					
Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta. (MR).					
Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). <i>Public Sector Accounting. Sixth Edition</i> . Pearson Education. England. (JP)					
Kuntadi, Cris. (2015). Si Kencur. Elex Media Komputindo. Jakarta (KC)					
IFAC & CIPFA. (2014). <i>International Framework: Good Governance in The Public Sector Accounting</i> . ISBN 978-1-60815-181-3. (IFAC-					

GG)

IPSASB. (2020). *Handbook Of International Public Sector Accounting Standards Pronouncements 2020 Edition Volume I-III*. ISBN 978-1-60815-451-7. English. (IPSASB)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP71)

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK): 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (ISAK35).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jo. UU Nomor 16 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. [UU Nomor 10 Tahun 2016](#), Jo. UU Nomor 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

[Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah](#)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Jo. PP Nomor 1 Tahun 2018.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

	UNIVERSITAS TADULAKO Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen/Program Studi S1 Akuntansi				
RENCANA PENUGASAN TERSTRUKTUR					
MATA KULIAH	Akuntansi Sektor Publik				
KODE	C32231014	sks	3	SEMESTER	3 (Tiga)
DOSEN PENGAMPU					
BENTUK TUGAS				WAKTU Pengerjaan Tugas	
Ujian Tertulis				Dalam Proses Perkuliahan	
JUDUL TUGAS					
Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK1 – Sub-CPMK9					
DISKRIPSI TUGAS					
1. Memahami Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik 2. Mampu Menyusun Perencanaan dan Penganggaran 3. Mampu Memahami Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik 4. Mampu Memahami Akuntansi Untuk Entitas Partai Politik 5. Mampu Memahami Akuntansi Untuk Entitas Non Government (LSM) 6. Mampu Memahami Akuntansi Untuk Yayasan 7. Mampu memahami Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah 8. Mampu memahami Akuntansi Untuk Entitas Institusi Pendidikan Badan Layanan Umum 9. Mampu Memahami Audit Sektor Publik					
METODE Pengerjaan Tugas					
SDL, dan CtL					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Soal dan Kasus b. Bentuk Luaran: Tertulis					
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
Kemampuan Menjelaskan Kerangka Konseptual dan Akuntansi untuk Entitas Sektor Publik serta Kemampuan dalam Menyusun perencanaan dan anggaran Entitas Sektor Publik, 30%					
JADWAL PELAKSANAAN					

PT	Proses Terstruktur
LAIN-LAIN	
DAFTAR RUJUKAN	
Halim, Abdul & Kusufi Muhammad Syam (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta. (HAK) Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta. (MR). Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). <i>Public Sector Accounting. Sixth Edition</i>. Pearson Education. England. (JP) Kuntadi, Cris. (2015). Si Kencur. Elex Media Komputindo. Jakarta (KC) IFAC & CIPFA. (2014). <i>International Framework: Good Governance in The Public Sector Accounting</i>. ISBN 978-1-60815-181-3. (IFAC-GG) IPSASB. (2020). <i>Handbook Of International Public Sector Accounting Standards Pronouncements 2020 Edition Volume I-III</i>. ISBN 978-1-60815-451-7. English. (IPSASB) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP71) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK): 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (ISAK35). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo..UU Nomor 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jo. UU Nomor 16 Tahun 2017 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016, Jo. UU Nomor 6 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.	

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Jo. PP Nomor 1 Tahun 2018.
Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
A	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
B	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
C	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	

NOTES: **JADWAL PELAKSANAAN TENTATIF (DISESUAIKAN DENGAN JADWAL/KALENDER AKADEMIK FEB)**

NILAI RUBRIK

Ketepatan menjawab Soal	Tidak tepat 20 poin	Kurang tepat 60 poin	Tepat 80 poin	Sangat tepat 100 poin
Sistematika menjawab Soal	Tidak sistematis 20 poin	Kurang sistematis 60 poin	Sistematis 80 poin	Sangat sistematis 100 poin
Kemampuan mendeskripsikan hasil	Tidak tepat 20 poin	Kurang tepat 60 poin	Tepat 80 poin	Sangat tepat 100 Poin
Ketepatan waktu mengumpulkan hasil	Tidak mengumpulkan 0 poin	Tidak tepat 60 poin	Tepat 80 Poin	Sangat tepat 100 poin

CONTOH LEMBAR PENILAIAN PARTISIPASI

JUDUL MAKALAH			
NAMA KELOMPOK PENYAJI			
NIM/NAMA ANGGOTA PENYAJI	1		
	2		
	3		

FASE	ASPEK	SKOR			
Pendahuluan	1. Menyampaikan tujuan dari presentasi	4	3	2	1
	2. Menghubungkan topik dengan pengetahuan lain yang relevan	4	3	2	1
Kegiatan Inti	3. Signifikansi [Kesesuaian/kebermaknaan topik yang dibahas]	4	3	2	1
	4. Pemahaman [Pemahaman terhadap hakikat dan ruang lingkup masalah yang disajikan]	4	3	2	1
	5. Argumentasi [Alasan yang diberikan terkait permasalahan yang dibicarakan]	4	3	2	1
	6. Responsifness [Kesesuaian jawaban yang diberikan dengan pertanyaan yang muncul]	4	3	2	1
	7. Penampilan [Rasa percaya diri dalam mempresentasikan makalahnya]	4	3	2	1
	8. Penyajian [Menyajikan materi secara sistematis dan runtut]	4	3	2	1
Penutup	9. Memberikan Rangkuman/kesimpulan	4	3	2	1
	10. Memberikan Penguatan	4	3	2	1
11. Kemenarikan presentasi		4	3	2	1
12. Kerjasama		4	3	2	1
Skor Rerata					

Yang Menilai

i

(_____)

FORMAT PENILAIAN *CASE METHOD*

No.	Nama Mahasiswa	NIM	ASPEK YANG DINILAI																				Jumlah Skor
			Ketepatan Menjawab Soal					Sistematika					Analisis					Ketepatan Waktu					
			0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1	Rolland M. Yusuf																						
2	Shery Natalia Gollah																						
3	Nina Yusnita Yamin																						
4	Selmita Paranoan																						
5	Rahayu Indriasari																						
6	Ni Made Suwitri																						
..																							

Yang Menilai

(_____)

Rubrik Penilaian Case Method

1. Ketepatan Menjawab Soal:
0=Sangat tidak tepat
1=Tidak tepat
2=Kurang tepat
3=Tepat
4=Sangat tepat
2. Sistematika:
0=Sangat tidak sistematis
1=Tidak sistematis
2=Kurang sistematis
3=Sistematis
4=Sangat Sistematis
3. Analisis, Kemampuan mendeskripsikan Soal:
0=Sangat tidak tepat
1=Tidak tepat
2=Kurang tepat
3=Tepat
4=Sangat tepat
4. Ketepatan Waktu
0=Sangat tidak tepat
1=Tidak tepat
2=Kurang tepat
3=Tepat
4=Sangat tepat

Kompilasi Penilaian:

NO	Komponen Penilaian	
1	Keaktifan/Partisipasi	10%
2	Tugas/Case Method	15%
3	Tugas/Team Based Project	35%
4	Ujian Tengah Semester	20%
5	Ujian Akhir Semester	20%

Penentuan Nilai Akhir

Kisaran Nilai Akhir (NA)	Huruf Mutu	Angka Mutu

85,1 – 100	A	4,00
80,1 -85	A-	3,75
75,1 – 80	B+	3,50
70,1 -75	B	3,00
65,1 – 70	B-	2,75
55,1 -65	C	2,00
45,1 -55	D	1,00
0 – 45	E	0